

Pembaca yang terhormat, perguruan tinggi terkemuka di Sumatera Selatan sampai saat ini masih dipergang oleh Universitas Sriwijaya. Meskipun status ini paling tidak diperlakukan oleh Unsi atau bahkan naik dari kelas regional ke kelas nasional kemudian kelas internasional atau kelas dunia. Itulah rencana dalam jangka panjang 12 tahun ke depan, menjadi universitas kelas dunia atau world class university (WCU). Untuk memapak tingkatannya tentunya membutuhkan perjuangan yang tidak ringan. Kerja sama yang baik antarkomponen merupakan suatu keharusan bagi kita semua warga Unsi.

Kita menghadapi tantangan besar setelah menyatakan kesiapannya sebagai salah satu perguruan tinggi di Indonesia yang sudah siap untuk menuju world class university. Oleh karena itu kita harus berbenah dalam segala bidang agar dalam perjalannya tidak mendapat banyak hambatan dan kita tidak mundur setelah maju. Kata pepatah, "sekali melengkuk pantang surut ke belakang" meski menjadi lekat kita bersama. Mari kita angkat rona baik kita ke tingkat nasional dan internasional.

Tiga pilar penting di perguruan tinggi yang sering kita sebut Tridharma, yaitu pendidikan dan pengajaran, pengabdian pada masyarakat, dan penelitian merupakan pilar-pilar yang mestinya terus berjalan dengan menghasilkan produk-produk terbaiknya. Menteri Pendidikan Nasional RI dalam sambutannya pada Album Emas Unsi, mengatakan, tantangan yang cukup berat bagi dunia pendidikan di Indonesia menonjot di depan mata. Posisi beberapa perguruan tinggi terkemuka Indonesia menjadi semacam peringatan bagi kita untuk bekerja lebih keras. Di masa perkembangan pesat teknologi saat ini, Indonesia tentu saja tidak ingin ketinggalan dengan negara-negara lain. Perkuliahan harus dilakukan di semua sektor, baik bangunan fisik, sarana belajar mengajar, fasilitas pendukung, dan sumber daya manusianya. Sementara itu sejumlah perguruan tinggi yang berusia relatif muda, seperti Universitas Sriwijaya telah menunjukkan prestasi yang baik.

Melalui pendidikan tinggi akan dibasiskan para intelektual yang diharapkan dapat membina negara dan bangsa Indonesia agar tetap berada di jalur yang tepat untuk menjadi sebuah negara maju. Intelektual yang diharapkan tersebut tidak saja menguasai ilmu dan seni, tetapi juga memiliki landasan moral yang tinggi. Kita tidak dapat menutup mata terhadap sejumlah kritikan yang meragukan kadar intelektualitas para sarjana kita. Indonesia harus menjawabnya dengan sikap yang tidak bersifat reaktif, melainkan melalui langkah proaktif melalui strategi yang tepat. Hal itu sejauh membuktikan bahwa sarjana-sarjana kita tersebut berkualitas dan dapat bersaing dengan sarjana-sarjana negara lain. Universitas Sriwijaya telah menyatakan kesiapannya dengan mencantumkan rencana untuk menuju world class university (WCU).

Pada laporan stama edisi ini Warta menyajikan bagaimana Lembaga Pengabdian pada Masyarakat, Lembaga Penelitian, UPT Penjaminan Mutu Unsi, dan Program Pascasarjana dalam meningkatkan citranya.

Dr. Ir Kiki Yulianti, M. Sc. mengatakan untuk meningkatkan citra diri Institusi pendidikan kita kuncinya kita harus memperbaiki dan membenahi dari bawah atau dari hal yang mendasari. Kalau semua sudah baik barang akan mengakui keunggulannya. Ketua Lembaga Pengabdian Masyarakat, Ketua Lembaga Penelitian, dan Direktur Pasca Sarjana juga menyampaikan program-programnya untuk meningkatkan citranya demi keberdayaan masyarakat.

Di samping itu pada edisi ini Warta juga menyajikan berita yang berkaitan dengan kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan yang kami rasa masih banyak untuk diketahui padahal meskipun ada beberapa informasi kegiatan yang sudah lumayan besar. Berikut kami sampaikan seputar kegiatan kampus, Antara lain pelaksanaan Dies Natalis Unsi, Konsert Kusuma dan Forum Pektor Indonesia, dan beberapa kegiatan lainnya.

Dari berbagai pelaksanaan Forum Pektor Indonesia, Konsert Kusuma dan beberapa kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan administrasi dan akademik yang dilaksanakan di Unsi ini, Unsi ini memang benar-benar berada di jalan yang benar. Kita punya cita-cita yang benar dan kita punya tujuan yang benar. Tahun ini kita punya tujuan untuk melanjutkan Warta sebagai media sebagian pelaksanaan kegiatan administrasi dan akademik terbaik. Pelaksanaan Kampus dan Forum Pektor Indonesia ini adalah musibah bagi kita.

Sementara itu pada edisi ini Warta menyajikan berita yang berkaitan dengan kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan Universitas Sriwijaya. Mor kita bersama-sama untuk meningkatkan citranya.

Redaksi

Penerbit
Humas Universitas Sriwijaya
Alamat Sekretariat Warta Universitas Sriwijaya
Humas Universitas Sriwijaya Kampus Unsi Inderalaya J0662 Ogan Ilir Tlp. (0711) 580169
Percetakan: PT. Sumsel Sarana Semesta

Warta Universitas Sriwijaya adalah majalah internasional yang diterbitkan oleh Humas Universitas Sriwijaya. Warta Universitas Sriwijaya diterbitkan dua bulan sekali dan didistribusikan kepada keluarga besar Universitas Sriwijaya dan pihak terkait lainnya.

Misi yang diambil media komunikasi cetak ini adalah untuk membentuk dan meningkatkan bobot informasi yang dapat mendorong laju proses pendidikan di Universitas Sriwijaya.

Secara khusus Warta meningkatkan fungsi komunikasi yang membantu terbentuknya mutu pegawai administrasi yang mampu mendukung proses pendidikan di lingkungan Universitas Sriwijaya.

Warta Universitas Sriwijaya menerima sumbangsih tulisan dari keluarga besar Unsi berupa laporan ringkas kegiatan administrasi dan kepegawaian, akademik dan kemahasiswaan, Dharma Wanita, Korpri, Koperasi atau artikel ringkas blimbingan kerja yang bertujuan meningkatkan mutu kerja dan pengabdian pegawai di lingkungan Unsi.

DAFTAR ISI

Laporan Utama

- Kalau Ingin Punya Daya Saing dan Eksis, Bereskan Hal yang Mendasar
- LPM dan Lembaga Penelitian Unsi Lakukan Kegiatan Berskala Internasional
- Tiga Langkah untuk Go Internasional

Seputar Kampus

- Unsi Pelaksana Konvensi Kampus dan Temu Tabungan PPI Terbaik
- Mengapa Indonesia Tidak Dianggap Setara oleh Negara Lain
- Kilasan Pelaksanaan Dies Unsi Ke-50
- LPM Unsi Kenalkan Biografi Sekala Rumah Tangga Kepada Masyarakat Inderalaya
- Olah Raga Merupakan Simulasi Kehidupan
- Launching Produk Inovatif dan Inversi Bidik 100 Pengusaha dan 30 Peneliti
- Lima Puluh Orang Mendapat Kesempatan Operasi Katarak Gratis
- Loknas FK P T-P Rumuskan Kurikulum dan Peminatan
- Serniloka Koordinasi Institusi Peningkatan Bencana
- Semua Lembaga Penerima APBD, APBN, dan Sumbangan Masyarakat Terkena IUU KIP
- Persiapan Ke Tingkat Nasional 222 Peserta Bertarung Merebut Juara

Info Keluarga

- Saya Sudah Mengabdi 35 Tahun
- Dua Puluh Sembilan orang yang Purnabakti
- Pelantikan dan Serah Terima Jabatan di Lingkungan Unsi

Sekilas Informasi Kegiatan Rektor

- Kegiatan Rektor Unsi

Warta LPM

- Pelatihan Kewirausahaan Tripartite II

Opini

- Pengangguran, Desentralisasi, dan Kebijakan Publik

Lensa Berita

-

Sususnan Redaksi Universitas Sriwijaya

Penanggung Jawab Pengarah	: Rektor Universitas Sriwijaya : Pembantu Rektor I : Pembantu Rektor II : Pembantu Rektor III : Pembantu Rektor IV
Penasehat	: Kepala BAUK : Kabag Kuntulakap
Pembina	: Agung Wibisono Rp, ST., MT.
Ketua Penyunting	: Sri Hartati, SH
Penyunting Pelaksana	: Soyo MN, S.Pd.
Wakil Penyunting Pelaksana	: Erma Novida, S.Sos.
Staf Penyunting	: Suami Foniph
Penilip	: Hj. Ayu Dewi Leslan Rahayu : Rima Fitriani : M. Ferdinandus Kusuma : arif Alkaffi
Bagian Informasi Fotografer	: Tumijan
Administrasi dan Keuangan	: Purwanto, S.Sos.
Distribusi dan Dokumentasi	: Wasjan : Hapti, S.Sos. : Yasikun

0	8	0	1	0	6	0	1	1	0	2	0	2	9
Kode Fakultas	Kode PG/Dagian	Kode Pdtkliksi	Kode Proses	Tahap Publikasi	Kode Sumber Tulisan	Nomor dan Perihal dari Tulisan							



Pengangguran, Desentralisasi, dan Kebijakan Publik

Oleh : Dr. Andries Lionardo, S.I.P, M.Si

Persoalan pengangguran baik di negara maju maupun negara berkembang saat ini sangat kompleks. Permasalahan ketenagakerjaan yang terjadi saat ini juga sangat banyak, seperti murahnya upah tenaga kerja, bertambahnya pengangguran terdidik, hadirnya tenaga kerja ilegal, sampai munculnya ego sosial mayarakat akan status sosial pekerjaan. Begitu juga di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Belum lagi masalah ketenagakerjaan yang disebabkan oleh sempitnya peluang kerja, tingginya angka pengangguran, rendahnya kemampuan sumber daya manusia tenaga kerja, dan akuntabilitas pemerintah yang belum juga muncul.

Di Indonesia, sejak era kemerdekaan sampai dengan saat ini kondisi tenaga kerja sangat memprihatinkan. Hal ini dapat dilihat dari adanya fenomena booming pencari kerja setiap tahunnya. Kondisi ini disebabkan oleh adanya kebijakan publik pemerintah yang hanya terfokus pada mengejar angka pertumbuhan pembangunan ketimbang pemerataan pembangunan dan peningkatan kapasitas pemanfaatan sumber daya alam. Akibatnya kesempatan kerja tidak terbuka bagi masyarakat. Mekanisme hubungan industrial yang selama ini lebih berpihak pada pengusaha ketimbang tenaga kerja turut memperburuk kondisi.

Wajar saja, jika dilihat dari sisi advokasi kebijakan publik banyak muncul demonstrasi kelompok buruh yang kemudian menjadi gerakan buruh untuk meraih hak-haknya sebagai pekerja. Bagi buruh melakukan unjuk



rasa atau pemogokan massal menjadi pilihan yang sering dilakukan untuk menarik perhatian pemerintah agar melahirkan kebijakan publik yang pro tenaga kerja.

Potret realitas di atas tentunya tidak sejalan dengan semangat desentralisasi pemerintahan yang terjadi di Indonesia saat ini. Urusan ketenagakerjaan saat ini merupakan urusan wajib pemerintah daerah. Sayangnya, di tingkat central government, persoalan utama ketenagakerjaan justru terkait lemahnya akuntabilitas politik (political will) pemerintah untuk merumuskan peraturan perundang-undangan yang sesuai dan seimbang dalam mengakomodir kepentingan tenaga kerja dan pencari kerja.

Lihat saja esensi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang dibuat sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997, masih belum memenuhi hak-hak normatif masyarakat pekerja bahkan lebih menguntungkan pelaku bisnis

dan industri.

Regulasi ini menuai konflik yang cukup mendalam di kalangan masyarakat pekerja. Di beberapa bagian dan amanat regulasi belum menggambarkan keberpihakan kepada pekerja untuk memperoleh hak-hak normatifnya, tetapi lebih berpihak kepada kepentingan pelaku bisnis dan industri. Hal itu dapat dilihat pada ketentuan upah minimum, pesangon, hak cuti, penggunaan tenaga kontrak dan pemberongan pada pihak perusahaan lain (outsourcing), dan hak mogok kerja yang masih melemahkan posisi tenaga kerja.

Beberapa pokok persoalan ketenagakerjaan Indonesia berkaitan dengan pelaksanaan "policy executing" (akuntabilitas administrasi) juga masih menyangkut. Secara garis besar dapat dilihat pada beberapa persoalan dasar, seperti tingginya jumlah populasi penduduk yang tidak sejalan dengan jumlah pengangguran dan angkatan kerja setiap tahunnya. Tentunya, kondisi ini merupakan cermin dan potret ketidakmampuan pemerintah dalam menciptakan program-program ketenagakerjaan yang berbasis kerakyatan dalam mengatasi tingkat pengangguran yang semakin hari semakin sulit diturunkan.

Selain hal di atas, substansi persoalan ketenagakerjaan juga menyangkut pelaksanaan kerjasama antartingkatan pemerintahan. Masalah ini terkait dengan lemahnya pertanggungjawaban administrasi pelayanan. Sulitnya arus masuk modal asing lebih disebabkan oleh iklim birokrasi dan berbagai regulasi yang kurang kondusif bagi investor untuk menanamkan sahamnya. Kondisi ini

secara khusus akibat pelaksanaan otonomi daerah yang dalam banyak hal belum mengedepankan sinkronisasi kebijakan dan melakukan upaya reformasi birokrasi daerah.

Kompleksnya persoalan ketenagakerjaan di atas berdampak kepada pengelolaan urusan ketenagakerjaan di tingkat pemerintahan lokal. Di tingkat daerah, persoalan akuntabilitas politik bidang ketenagakerjaan menyangkut persoalan sentralisasi kebijakan ketenagakerjaan. Aktor pemerintah daerah (Pemda dan DPRD) saat ini belum mampu memunculkan inisiatif kebijakan yang berkarakteristik lokal dalam perencanaan pembangunan ketenagakerjaan. Hal ini dapat dibuktikan dengan masih banyaknya daerah yang sampai saat ini belum memiliki "political will" dalam merumuskan Peraturan Daerah (Perda) khusus ketenagakerjaan yang berbasiskan "locality". Kebijakan ketenagakerjaan yang diterapkan selama ini masih mengacu kepada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang faktanya tidak disukai para pekerja. Kondisi ini menjelaskan bahwa "transfer of authority" yang diterima oleh pemerintah daerah dalam rangka desentralisasi pemerintahan bidang ketenagakerjaan belum dimanfaatkan secara maksimal.

Lemahnya inisiatif kebijakan pemerintah daerah dalam menentukan dan merumuskan kebijakan ketenagakerjaan menyebabkan persoalan ketenagakerjaan semakin sulit untuk diatasi, sehingga menyebabkan birokrasi lamban dalam memenuhi harapan masyarakat pekerja. Secara prinsip, fenomena-fenomena di atas juga disebabkan oleh adanya ketidaksesuaian antara kualitas dan kualifikasi lulusan pendidikan terhadap permintaan pasar kerja. Kondisi ini akhirnya menyebabkan permintaan tenaga kerja terdidik sulit menyesuaikan dengan kebutuhan pelaku bisnis (sektor swasta) dan

berimplikasi pada ketimpangan upah dan tidak terpenuhinya permintaan pasar akibat kelangkaan tenaga kerja. Begitu juga dengan belum sejatinya beberapa kebijakan kurikulum yang digunakan perguruan tinggi terhadap permintaan pasar tenaga kerja. Tidaklah mengherankan apabila angka pengangguran terdidik relatif tinggi terjadi di daerah perkotaan (urban area).

Realitas di atas setidaknya menggambarkan bahwa peran pemerintah daerah dalam membuat terobosan kebijakan publik yang menyangkut upaya pengentasan masalah ketenagakerjaan di tingkat lokal dengan berorientasi pada strategi penyerapan tenaga kerja belum dirasakan berjalan secara optimal. Sebuah solusi terhadap persoalan ini tentunya bisa diawali dengan membangun kemitraan strategis antara pemerintah daerah (DPRD dan Pemda), private sector (perusahaan), masyarakat dan elemen internasional pada setiap level pemerintahan, sehingga menjadi kekuatan yang besar dalam mendukung dan mewujudkan optimalisasi penyelenggaraan fungsi pemerintah daerah di bidang ketenagakerjaan. Hal ini wajib dilakukan mengingat penyelenggaraan urusan ketenagakerjaan yang ada saat ini masih berorientasi pada regulasi, tidak inovatif dan masih berorientasi pada kekuasaan yang diwujudkan dalam hegemoni negara yang sangat kuat sehingga cepat atau lambat akan menyebabkan resistensi masyarakat.

"Melihat persoalan ketenagakerjaan yang demikian kompleks di atas, relasi yang kuat dan seimbang antara tenaga kerja, pencari kerja, swasta, dan negara sudah seharusnya setara dalam menyelesaikan masalah ketenagakerjaan di era otonomi daerah saat ini"

Banyak faktor yang mempengaruhi munculnya masalah ketenagakerjaan, seperti ekonomi, politik, bahkan intervensi ideologi kapitalisme dunia saat ini. Oleh karena itu, penyelesaian masalah sangat membutuhkan kebijakan publik yang netral, seimbang, dan fokus pada substansi persoalan ketenagakerjaan saat ini. Dalam kondisi seperti ini, perubahan sistemik menjadi alternatif terbaik. Terlebih, selama ini sentralisasi regulasi pengelolaan urusan ketenagakerjaan masih didominasi oleh besarnya peran pemerintah pusat dibanding institusi daerah (Pemda, DPRD, swasta, dan masyarakat).

Padahal, perubahan kebijakan desentralisasi seharusnya membawa arah pembangunan bersama bagi setiap aktor governance baik pada level pemerintah kota/kabupaten (local level), pemerintah provinsi (regional level), pemerintah pusat (national level), bahkan pada lembaga internasional (international level) dalam mewujudkan kemandirian dan demokratisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Setidaknya dalam konteks kasus ketenagakerjaan dalam artikel ini harus dapat disiasati melalui penciptaan model penyelenggaraan akuntabilitas pemerintah daerah, baik dalam perspektif akuntabilitas politik, maupun administrasi yang mampu memotret peran dan kesetaraan fungsi aktor-aktor yang terlibat dalam pengelolaan sektor ketenagakerjaan di tingkat lokal. Pengembangan model tersebut juga harus dibungkus dengan prinsip inovasi, kemitraan, ketrampilan (profesionalitas) dan kebijakan yang demokratis. Hal ini penting mengingat perubahan model pemerintahan daerah yang terjadi saat ini belum menjamin tercapainya kebutuhan masyarakat lokal dalam mendapatkan kesempatan kerja.